



Tiga Kawasan Kumuh di Yogya akan Dibenahi

YOGYAKARTA — Sebanyak tiga kawasan yang masuk dalam kriteria kumuh akan segera ditangani Pemerintah Kota Yogyakarta bersama pemangku kepentingan dengan fokus utama di wilayah Kelurahan Kricak, Kelurahan Tegul Pangung dan Kelurahan Sorosutan.

"Penanganannya dengan program Merti Kampung, yaitu tidak hanya melakukan perbaikan fisik rumah tetapi juga infrastruktur di kawasan tersebut, misalnya sarana jalan," kata Ketua Pusat Kajian Perumahan dan Permukiman Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr Ir Budi Prayitno, dalam seminar perumahan dan permukiman di Yogyakarta, Rabu (11/3).

Menurut Budi, program Merti Kampung menuntut peran serta masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh di lingkungan tempat tinggalnya.

Dengan peran serta masyarakat tersebut, menurut dia, program penanganan yang dijalankan dapat lebih tepat sasaran dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Kebijakan secara nasional sudah ada tetapi program tersebut harus disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah yang memiliki keumihan sendiri," katanya.

Ia mengatakan, Pada 2009, di Kelurahan Kricak juga akan didirikan sebuah rumah susun dengan dana pembangunan dari UN Habitat sebesar Rp 10 miliar untuk penanganan kawasan kumuh.

Berdasarkan rencana, rumah susun tersebut akan ter-

diri dari dua blok yang masing-masing blok terdiri dari empat lantai. Tiga lantai atas digunakan sebagai hunian sedang lantai dasar dipakai sebagai tempat komersial. "Lahannya sudah ada, yaitu sudah disediakan oleh pemerintah kota dengan luas sekitar 4 ribu meter persegi," ujarnya.

Pembangunan rumah susun, menurut Budi, juga merupakan salah satu cara penanganan kawasan kumuh karena rumah susun dapat membantu efisiensi kawasan.

Secara umum, kawasan yang berpotensi menjadi daerah kumuh adalah tepi sungai, tengah kota, daerah di sepanjang rel kereta api dan dekat pasar.

Dari 45 kelurahan di kota Yogyakarta sebanyak 14 persen dari jumlah itu berada di sepanjang sungai Code, Winongo dan Gajah Wong, 12 persen berada di daerah sub urban, 32 persen berada di tengah kota, sembilan persen berada di sepanjang rel kereta api dan tiga persen berada di dekat pasar,"katanya.

Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, Eko Suryo Maharsono menyatakan, untuk mengatasi kesenjangan antara permukiman di kampung dan pinggir jalan adalah dengan pemerataan fasilitas publik. "Tetapi juga perlu dicari akar permasalahannya sehingga kesenjangan yang ada tidak lagi terlalu jauh," katanya.

Sejumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut menyambut gembira rencana pemerintah yang menurut mereka sangat baik. ■



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pemukiman dan Prasarana	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Badan Perencanaan Pembangunan			

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005